

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik dewasa ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik, sehingga mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk menerapkan dan lebih meningkatkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pemegang amanah mengenai segala aktivitas-aktivitas organisasi yang telah dilaksanakannya kepada pemberi amanah terkait masalah informasi laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi (Mardiasmo, 2002)

Para pengguna laporan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang bersifat akuntabilitas dan transparan, karena laporan keuangan daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan sesuai dengan undang undang nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Informasi laporan keuangan yang memiliki nilai kebermanfaatan adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yang digunakan sebagai tolak ukur secara normatif yang dapat membantu informasi akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi , yang termasuk karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah :

1. Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang tersedia didalamnya mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi pengguna untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, serta memprediksi masa depan dan juga menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi yang telah dilakukan dimasa lalu.

1. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material serta menyajikan laporan keuangan berdasarkan fakta yang ada, jujur dan dapat diverifikasi.

2. Dapat dibandingkan

informasi laporan keuangan yang termuat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, atau dibandingkan dengan keuangan entitas lain pada umumnya.

3. Dapat dipahami

Informasi laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pemakai atau pengguna laporan keuangan dengan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan menurut batas pemahaman pengguna.

Pemerintah daerah dikatakan mampu mewujudkan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.

Dalam penyajian laporan keuangan harus diperhatikan bahwa banyak pihak yang mengandalkan laporan keuangan untuk diandalkan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu suatu laporan keuangan harus memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai atau pengguna laporan keuangan.

Pada kondisi sekarang, banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Masih banyak data-data laporan keuangan yang disajikan jauh dari kenyataan. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Salah satu penyimpangan yang ditemukan BPK adalah pada saat dilakukannya pemeriksaan reguler secara menyeluruh dimana meliputi 5 aspek yaitu aspek tupoksi, aspek keuangan, sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana serta aspek metode kerja ditemukan beberapa permasalahan yaitu pada tugas pokok dan fungsi ada 3 masalah (5,17%) aspek keuangan terdapat 14 masalah (24,13%), aspek SDM tidak dijumpai masalah, aspek sarana dan prasarana ditemukan 40 masalah (68,96%) dan

metode kerja terdapat 1 masalah (1,74%). Sedangkan menurut jenis masalah , temuan kerugian/pemborosan keuangan Negara ada 10 masalah, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat 19 masalah (32,76%) disamping masalah-masalah yang lain. (Slemankab, 2010)

Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa masih terdapat laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah masih jauh dari kriteria kualitatif laporan keuangan , padahal pemerintah membutuhkan baik informasi laporan keuangan daerah maupun informasi laporan keuangan pusat tepat waktu dan andal, adapun faktor yang mempengaruhi nilai informasi keuangan daerah diantaranya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri sudah memperoleh predikat WTP dari BPK akan tetapi WTP ini tidak menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan, beberapa pendapat mengenai perolehan WTP pada Kabupaten Sleman adalah :

- Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, Sunarto, menjelaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara karena Opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis. Tercapainya opini WTP kali ini tidaklah menjamin bahwa tahun-tahun yang akan datang BPK juga

memberikan opini WTP atas LK Pemerintah Daerah. Perwakilan lebih lanjut. Sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, maka diharapkan agar semua Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi DIY segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Diharapkan pula Hasil Pemeriksaan BPK ini bisa memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .(BPKRI, 2013).

- Kabupaten Sleman memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dalam 5 tahun berturut turut, dimana dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualiaan, untuk mempertahankan WTP setiap SKPD dihimbau untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta memperhatikan tertib administrasi dan pengelolaah mulai dari tingkat desa, serta adanya transparasi terhadap informasi laporan keuangan . Meskipun opini WTP merupakan indikator clean and good governance namun demikian, opini WTP bukanlah jaminan untuk mewujudkan good and corporate governance. WTP bukan tujuan utama mengingat proses menuju opini WTP tersebut yang justru lebih penting. dikarenakan proses tersebut menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan budaya kerja birokrasi yang optimal. (Slemankab.go.id, 2016)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2015) Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2010) Hasil dari penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan. dan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Karmila dkk (2013) hasil dari penelitian ini adalah sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kemudian Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan hasil penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ariesta (2013) dengan adanya tambahan variabel yang dimungkinkan dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan daerah yaitu variabel Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi**

Informasi , Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Sleman”. Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi akademisi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan nilai informasi laporan keuangan.

2. Manfaat di Bidang Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak di pemerintahan daerah terkait dengan nilai informasi pelaporan keuangan.